

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anjar Agus dkk. (2021). *Pemerintahan Daerah, Desa dan Kelurahan*. Yogyakarta: Deepublish hlm 1

Dadang. (2021). *Kedudukan dan Fungsi Rekomendasi DPRD dalam Penyelenggaraan Kewenangan Perizinan*. Banyumas: CV. Pena Persada. Hlm. 47-49

Manan Abdul, *Dinamika Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), h.73.

Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, h. 61.

Rahayu Sri Ani. Sinar Grafika Rawamangun Jakarta. *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*. (Jakarta: Sinar Grafika: 2018). Hal 5

Jurnal dan Skripsi

Rahayuningsih Eka. Tesis. *Implementasi Kebijakan Penyaluran dan Pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Korban Covid-19 di Desa Bulumargi Perspektif Masalah*. 2021. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Hal 1

Wati Laras Dessy. Skripsi. *Peranan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Perekonomian Masyarakat Miskin Yang Terkena Dampak Covid-19 Di Kanagarian Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupeten 50 Kota Ditinjau Menurut Menurut Ekonomi Syariah*. 2021. UIN Riau. Hal 1

Baso Iping, “Perindungan Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)”, dalam Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial, Volume 1, Issue 2, Juli 2020, h. 517

Pramusya Arisnanda Muhammad. Skripsi. *Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Non Tunai Bagi Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19 Di Kelurahan*

Pabuaran Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor". 2022. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hal 3

Sofie Khomarul Laili Arviolita. Skripsi. *Implementasi program pengembangan pendamping usaha kecil menengah pada dinas koperasi kota Tangerang selatan*. Tahun 2021., (Jakarta: Unas). Hal 34

Rahmansyah Akhmad dkk. 2019. *Diponegoro Law Jurnal. Pelaksanaan fungsi pengawasan dewan perwakilan rakyat daerah terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kota semarang tahun 2017*. Volume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Oktarina Ayu. Skripsi. *Strategi Public Relations dalam Mempertahankan Citra Positif Dprd Kabupaten Rejang Lebong*. 2019.(Curup: IAIN), Hal 4-5

Rokim. *Analisis Kebijakan Versi Dunn & Implementasinya Dalam Pendidikan Islam*. Vol.14, No.2, Desember 2019. Jurnal Studi Islam. Hal 63

Dasar Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3)

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Pasal 208 ayat (1) undang-undang No.23 Tahun 2014

Pasal 100 Undang-undang No.23 Tahun 2014

Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2019

Website

<https://dinsos.bogorkab.go.id/visi-misi/>

<https://dinsos.bogorkab.go.id/profil/>





LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman Wawancara

Dalam upaya memperoleh data, penelitian ini menggunakan wawancara sebagai metode utama untuk melakukan pengkajian data secara mendalam. Berikut ini merupakan pedoman wawancara yang bersifat general karena adanya keterkaitan diantara variabel sehingga beberapa indikator juga ditunjukkan kepada responden atau informan yang berbeda.

No.	Indikator	Kasi Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Bogor	Kabag fasilitasi penganggaran dan pengawasan DPRD Kabupaten Bogor	Subbag fasilitasi pengawasan DPRD Kabupaten Bogor	Kasubbag program dan keuangan Kecamatan Cibinong	Masyarakat
1.	Komunikasi	Apakah tujuan dari program Bantuan Langsung Tunai?	Apa mekanisme yang diterapkan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Bogor?	Apa mekanisme yang diterapkan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Bogor?	Menurut bapak/ibu apakah pelaksana program ini sudah sesuai dengan prosedur?	Apakah bapak/ibu sudah mengetahui tentang program bantuan langsung tunai?
		Apa aturan atau dasar hukum dari program Bantuan Langsung Tunai?	Menurut bapak, apa makna dari adanya fungsi pengawasan yang	Menurut bapak, apa makna dari adanya fungsi pengawasan	Apakah program bantuan langsung tunai	Menurut bapak/ibu apakah dengan adanya program blt2

			dimiliki oleh DPRD Kabupaten Bogor?	yang dimiliki oleh DPRD Kabupaten Bogor?	memberikan manfaat untuk masyarakat kecamatan Cibinong?	memberikan manfaat atau justru merugikan?
		Bagaimana cara mensosialisasikan program tersebut?	Apa aturan atau dasar hukum dari fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Bogor?	Apa aturan atau dasar hukum dari fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Bogor?	Apakah terdapat hambatan dalam menjalankan program tersebut?	Menurut bapak/ibu apakah tujuan yang dilakukan sudah dirasakan?
		Apakah terdapat kendala dalam mensosialisasikan program tersebut?			Menurut bapak/ibu apakah masyarakat penerima Bantuan Langusng Tunai sudah merasa terbantu dengan adanya program tersebut?	
		Bagaimana bentuk koordinasi lintas sektor dalam				

		menjalankan program BLT pada dinas sosial?				
2.	Sumber daya	Bagaimana alokasi anggaran untuk pembiayaan program Bantuan Langsung Tunai?	Apa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Bogor?	Apa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Bogor?	Apakah masyarakat penerima bantuan langsung tunai diberikan secara langsung oleh penyelenggara?	Apakah bpk/ibu mengikuti program bantuan langsung tunai?
		Apakah terdapat kendala dalam anggaran tersebut?				
3.	Sikap Pelaksana	Bagaimana cara bapak memastikan seorang pemimpin dapat memberikan bantuan langsung tunai secara efisien?	Bagaimana pengaruh fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Bogor terhadap penyaluran bantuan langsung tunai di Kecamatan Cibinong?	Bagaimana pengaruh fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Bogor terhadap penyaluran bantuan langsung tunai di Kecamatan Cibinong?	Menurut bapak/ibu penyampaian informasi seperti apa yang mudah diterima langsung oleh masyarakat penerima bantuan langsung tunai?	Apakah bpk/ibu berperan aktif dalam program bantuan langsung tunai?
		Apakah ada			Apakah ada	Menurut

		aturan khusus dalam memberikan bantuan langsung tunai harus sesuai prosedur?			kendala dalam menyampaikan informasi tersebut?	bapak/ibu apa alasan sehingga bapak/ibu berperan aktif dalam program bantuan langsung tunai?	
		Bagaimana jika seorang pemimpin tidak memberikan bantuan langsung tunai dengan ketentuan yang berlaku?	Bagaimana jika seorang pegawai tidak menerapkan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan program kinerja DPRD?	Bagaimana jika seorang pegawai tidak menerapkan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan program kinerja DPRD?	Apakah informasi yang diberikan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat penerima bantuan langsung tunai?		
4.	Struktur Birokrasi	Apakah terdapat kualifikasi tertentu untuk orang-orang yang menempati	Menurut bpk, apa penyebab utama munculnya keluhan masyarakat	Menurut bpk, apa penyebab utama munculnya keluhan	Apakah seorang pelaksana atau pemimpin sudah	Apakah ada seorang pemimpin yang meminta imbalan?	

		jabatan dalam program bantuan langsung tunai?	terhadap penyaluran bantuan langsung tunai di Kecamatan Cibinong?	masyarakat terhadap penyaluran bantuan langsung tunai di Kecamatan Cibinong?	menjalankan tugasnya dengan baik?	
		Apakah ada aturan atau dasar hukum yang menempati jabatan tersebut?	Apakah ada aturan atau dasar hukum yang menempati jabatan tersebut?		Apakah seorang pemimpin mendukung adanya program bantuan langsung tunai?	Apakah seorang petugas atau pemimpin dari dinas sosial datang langsung untuk mengarahkan program blt kepada bapak/ibu?
		Bagaimana bapak menilai orang yang bpk tempatkan tersebut sesuai atau belum?	Apa mekanisme yang diterapkan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Bogor?		Apakah dalam pelaksanaan program tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan?	

HASIL WAWANCARA

Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin dengan Bapak Dr. Djodi Anggoronadi

Hasil wawancara Bapak Dr. Djodi Anggoronadi (Kepala penanganan fakir miskin Dinas Sosial Kabupaten Bogor)

1. Apakah tujuan dari program bantuan langsung tunai?

Terkait dengan wabah covid-19, turunkah bantuan dari pemerintah. Bantuan itu tujuannya untuk mengurangi beban pengeluaran. Karena disaat wabah covid itu ada PPKM atau PSBB. Disaat covid, orang disuruh mengurangi aktivitas sehingga pemerintah hadir memberikan bantuan untuk mengurangi beban. Kalau untuk bantuan presiden ini, memang ditujukan kepada 7 kecamatanyang berbatasan dengan Jakarta, salah satunya Cibinong. Cibinong itulah yang ada bantuan presiden dalam bentuk sembako. Bantuan presiden ini jangk awaktunya 1 tahun sampe dengan Bulan Desember. Waktu itu bantuan diberlakukan secara bertahap

2. Apa aturan atau dasar hukum dari program bantuan langsung tunai?

Dalam Kabupaten Cibinong hanya sebagai pelaksana dan penyedia data. Dasar hukum nya yaitu pihak yang memberikan bantuan. Program bantuan presiden ini dari kemensos yang memiliki dasar hukum tersendiri. Kalau dinas sosial hanya sebatas mengusulkan calon penerima. Jadi, kita diminta untuk mengusulkan dari 7 kecamatan sebagai calon penerima bantuan presiden dari kemensos.

3. Bagaimana cara mensosialisasikan program tersebut?

Program ini darurat dengan adanya wabah covid, jadi setelah kita menyampaikan sosialisasi kita bersurat ke kecamatan agar pihak kecamatan memerintahkan desa atau kelurahan untuk melakukan pendataan.

4. Apakah terdapat kendala dalam mensosialisasikan program tersebut?

Kendala terdapat pada data penerima bantuan. Kita tidak bisa melakukan verifikasi lapangan. Kedua, kendalanya di kemensos adalah meminta data yang valid sesuai administrasi kependudukan. Jadi kemarin memang banyak data yang tidak valid, terutama NIK. Walaupun valid, mungkin burur-buru diminta datanya jadi pas pengetikan terjadi kesalahan. Itulah data –data seperti itu disingkirkan tidak mendapat bantuan. Orang desa atau kelurahan pas bantuannya datang, kok yang dapat bantuan yang itu bukan yang ini. Terkait dengan kesadaran individu masing-masing. Harus mengupgrade kartu keluarga (contoh) dan akte kelahiran.

5. Bagaimana bentuk koordinasi lintas sektor dalam menjalankan program BLT pada Dinas Sosial?

Koordinasi kita pertama ke Kementerian Sosial. Kedua kita koordinasi ke Provinsi Jawa Barat karena kita berusaha untuk tidak terjadi double bantuan. Dari Kementerian dapat bantuan dari Provinsi juga dapat bantuan. Kita setelah berjalannya waktu kita koordinasi dengan Dinas Pencatatan Kependudukan Sipil. Kita minta untuk perbaikan data. Kita juga koordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan karena dinas ini ditugaskan oleh bupati untuk menyalurkan bantuan bupati. Banpres dalam bentuk sembako itu bantuan untuk 7 kecamatan. Kita ada 33 kecamatan dalam bentuk blt disalurkan melalui kantor pos. Data-data ini kita bedakan, sebelum covid pemerintah kemensos itu memang sudah ada program bantuan keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non-tunai (BPNT). Data ini

diperoleh dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Semenjak covid ada bantuan presiden, bantuan provinsi, bantuan kabupaten. Ketiga ini sumber dari Non-DTKS, dimana orang-orang yang mendapat bantuan BPNT dan PKH. Itu berjalan sampai tahun 2020. 2021 itu banpres sudah tidak ada lagi dialihkan ke program BPNT. Kedua bantuan provinsi juga 2021 tidak ada. Provinsi bersurat ke bupati agar yang kemarin mendapat bantuan gubernur agar diusulkan ke DTKS. Karena sudah tidak sanggup memberi bantuan, jadi dimasukkan ke DTKS.

Tinggal bantuan presiden akhirnya dari kemensos dikasih bantuan jadi dimasukkan kedalam DTKS. Jadi keempat inilah akhirnya di 2021 dalam bentuk BPNT. 2021 ada kebijakan kemensos program BPN melalui KKS (Kartu Keluarga Sehat) dalam bentuk ATM ke agen yang sudah ditunjuk, digesek agar mendapat sembako (BPNT). Kemensos program nya dialihkan tidak melalui KKS, tetapi melalui kantor pos. Kemensos memberikan data dan memberikan uang ke kantor pos. Uang blt sebesar 300 ribu. orang yang menerima blt adalah orang yang menerima BPNT termasuk yang mendapat bantuan presiden, bantuan provinsi. Kita mendapatkan informasi dari kemensos bahwa blt ini sejumlah 383 ribu, itu sudah diakumulasi

6. Bagaimana alokasi anggaran untuk pembiayaan program bantuan langsung tunai?

Anggaran itu berasal dari kemensos, kita dinas sosial tidak mengalokasikan bantuan anggaran. Karena kondisi covid, anggaran rutin kita dikurangi untuk penanggulangan covid, terutama yang tenaga kesehatan. Jadi kita dikurangi pada tahun 2020-2021.

7. Apakah terdapat kendala dalam anggaran tersebut?

Kalau untuk kendala mungkin dari pihak dinas sosial hanya pada saat turun ke lapangan karena bertemu dan berinteraksi langsung dengan masyarakat, jadi pelaksana dari dinas sosial harus teliti dalam penyaluran bantuan langsung tunai dengan mengecek kembali sudah sesuai dengan data atau tidak.

8. Bagaimana cara bapak memastikan seorang pemimpin dapat memberikan bantuan langsung tunai secara efisien?

Sebetulnya tingkat efisien itu pasti tepat sasaran, kedua kita dengan berjalannya waktu karena menggunakan aplikasi SIBOS jadi berjalannya waktu kita juga menghimbau ke desa atau kelurahan karena mereka punya akses. Kita menghimbau untuk melakukan ketidaklayakan, jadi menurut orang desa ada yang tidak layak mendapatkan bantuan itu bisa diusulkan oleh desa di stop bantuannya. Sebaliknya apabila desa melihat ada masyarakat miskin yang belum dapat bantuan bisa dia mempunyai akses untuk mengusulkan tetapi teknis di lapangan tidak semudah teori yang ada. Orang desa hati-hati untuk mentidaklayakan bantuan.

9. Apakah ada aturan khusus dalam memberikan bantuan langsung tunai harus sesuai prosedur?

Aturan khusus itu kita juga mengacu pada pemberi bantuan, yaitu kemensos. Disitu memang kemensos itu ada peraturan kementerian sosial Nomer 164 Tahun 2013 itu ada kriteria masyarakat miskin yang bisa diusulkan bisa masuk ke DTKS dan mendapatkan bantuan sosial. Tetapi aturan itu di tahun 2013 dan aturan itu memang sudah agak tidak relevan dengan kondisi sekarang. Misalnya salah satu masyarakat miskin listriknya tidak menggunakan meteran dia nyolok dari tetangga tapi kondisi saat ini 1001. Kemungkinan sudah tidak ada. Kondisi rumah itu ubin

nya tidak berkualitas, dinding rumah terbuat dari kayu. Persyaratan itu sulit untuk diterapkan pada masa saat ini.

10. Bagaimana jika seorang pemimpin tidak memberikan bantuan langsung tunai ketentuan yang berlaku?

Pertanyaan ini sebenarnya tidak ditujukan kepada kita tetapi lebih ditujukan kepada orang yang memberikan bantuan, yakni mulai dari provinsi, kabupaten, kecamatan, desa atau kelurahan itu tidak memberikan bantuan, bantuan itu datang dari kementerian sosial. Kami hanya sebatas terkait dengan data. Bantuan nya pun tidak melalui dinas sosial, tidak melalui provinsi, tidak melalui kabupaten, kecamatan atau desa. Bantuan itu dari kemensos memberi data kepada kantor pos. Ini data nya dan ini juga uang nya. Kalau dari dinas sosial tidak ada bentuk langsung.

11. Apakah terdapat kualifikasi tertentu untuk orang-orang yang menempati jabatan dalam program bantuan langsung tunai?

Kita harus bisa membedakan antara jabatan dengan kegiatan. Jadi di kantor jabatan saya sub koordinator penanganan fakir miskin. Jabatan itu sudah ada sebelum blt ada. Nah kegiatan ini ada kaitan nya dengan saya jabatan saya berarti tugas saya bertambah. Jadi blt ini muncul sesudah sub koordinator ada. Jadi memang untuk jabatan terkait dengan blt tidak ada persyaratannya. Tahun 2017, kita di konsentrasikan dengan permasalahan fakir miskin.

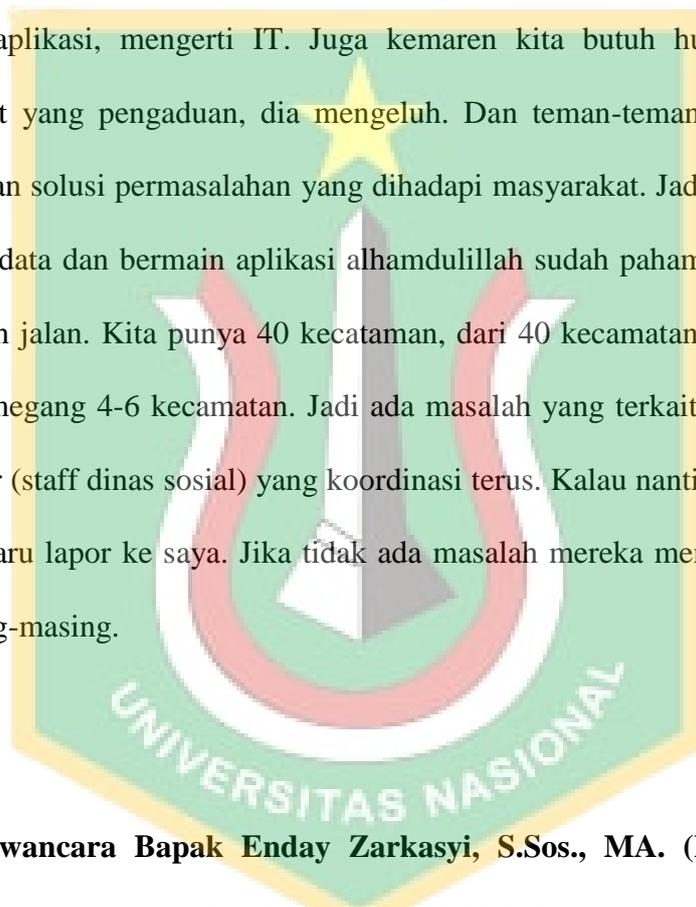
12. Apakah ada aturan atau dasar hukum yang menempati jabatan tersebut?

Dasar hukum nya tadi tahun 2017 saya sebagai kepala seksi penanganan fakir miskin. Tapi tahun 2020 ada covid, akhirnya jadi pekerjaan tambahan. Karena

kondisi wabah pandemi harus kerja cepat sehingga sudah tidak memikirkan dasar hukum nya apa karena kit akan penanganan fakir miskin, salah satunya verifikasi data masyarakat miskin otomatis melekat pendataan nya di saya.

13. Bagaimana bapak menilai orang yang bapak tempatkan tersebut sudah sesuai atau belum?

Kalau di saya teman-teman sudah sesuai. Karena yang saya butuhkan adalah yang mengerti aplikasi, mengerti IT. Juga kemaren kita butuh humas. Kalau ada masyarakat yang pengaduan, dia mengeluh. Dan teman-teman disini harus bisa menjelaskan solusi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Jadi kita kerja hanya mengolah data dan bermain aplikasi alhamdulillah sudah paham. Ibarat nya saya tinggal pun jalan. Kita punya 40 kecamatan, dari 40 kecamatan ini rata-rata satu orang memegang 4-6 kecamatan. Jadi ada masalah yang terkait di kecamatan A, jadi Januar (staff dinas sosial) yang koordinasi terus. Kalau nanti ada kendala atau masalah baru lapor ke saya. Jika tidak ada masalah mereka menyelesaikan tugas nya masing-masing.



Hasil Wawancara Bapak Enday Zarkasyi, S.Sos., MA. (Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan DPRD Kabupaten Bogor)

1. Apa mekanisme yang diterapkan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Bogor?

Penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh pemda dan DPRD. Pemda tidak hanya disini tetapi adanya Bupati dan DPRD. Untuk menjalankan pemerintahan itu, DPRD memiliki fungsi. Fungsinya adanya 3, fungsi pembentukan peraturan

daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan luas. Pengawasan pembentukan pemerintah daerah ada di BAPEMPERDA. Kalau di DPRD mengenai kebijakan anggaran salah satunya kaitan dengan LHP, contohnya Laporan Hasil Pemeriksaan KPK ada temuan, maka DPRD Mempunyai fungsi untuk mengawasi dalam pengawasan tersebut sudah ditindak lanjuti atau belum. Di DPRD Kabupaten Bogor cenderung lebih ke fungsi pengawasan dan fungsi penganggaran.

Itupun dalam fungsi penganggaran DPRD ada badan yg menyelenggaran yaitu AKD (Alat Kelengkapan Dewan) ada badan anggaran, badan pembentukan peraturan daerah, badan musyawarah, badan kehormatan DPRD, komisi 1, 2, 3, dan 4. Masalah pengawasan dan peraturan perundang-undangan ada di BAPEMPERDA. Jadi pengawasan nya bagaimana bupati membuat peraturan bupati mereka mengawasi apa yg sudah disosialisaikan kepada publik, DPRD memiliki fungsi pengawasan baik dalam bidang aktif-normatif perundang-undangan nya maupun dalam pelaksanaan nya.

2. Menurut bapak, apa makna dari adanya fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD Kabupaten Bogor?

Secara umum diketahui bahwa manajemen itu banyak fungsi, yang mudah dipahami adalah P.O.A.C. (Planning, Organizing, Actuating, and Controlling). Sekarang misalnya membuat perencanaan, apa perencanaan pembangunan kemudian dilaksanakan oleh SKPD di organisir, lalu dilakukan pengawasan. Jadi sehebat apapun sebuah pengawasan tanpa diawasi dari sisi perencanaan tidak akan maksimal. Jadi fungsi pengawasan itu melekat dari awal sampai akhir. Yang diawasi telah terjadi dalam pengawasan.

Maka DPRD dalam hal ini fungsi pengawasannya tentunya bermitra dengan pemerintah daerah, saling mengisi karena pemerintah daerah itu juga bagian dari DPRD. DPRD dan bupati merupakan pemerintah daerah jadi satu kesatuan. Maka dalam pembentukan perda ada inisiatif dari DPRD, ada juga inisiatif dari pemerintah daerah. Sehingga pada saat pembahasan mereka dibahas secara bersamaan atas persetujuan bersama (perda).

3. Apa aturan atau dasar hukum dari fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Bogor?

Dasar hukum yang atas ada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian ada peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang tata tertib. Di DPRD ada Peraturan DPRD Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan DPRD Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2018 tentang tata tertib.

4. Apa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Bogor?

Kembali lagi ke manajemen, yaitu unsur manajemen dimana ada man (sumber daya manusia yang khusus), money (ada anggaran gak untuk mengawasi itu), material (ada ga sarana untuk menunjang nya, kan pengawasan Kabupaten Bogor kan luas, machine (sarana), kemudian method (tata cara pelaksanaan nya) dan market (ter publikasi atau engga).

5. Bagaimana pengaruh fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Bogor terhadap penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Kecamatan Cibinong?

DPRD engga langsung memberikan secara grafis di lapangan. Yang memberikan langsung kan pemerintah pusat atau pemda yang melaksanakan ada perangkat daerah ada dinas sosial. Pengawasan ada dua ada pengawasan internal, maupun

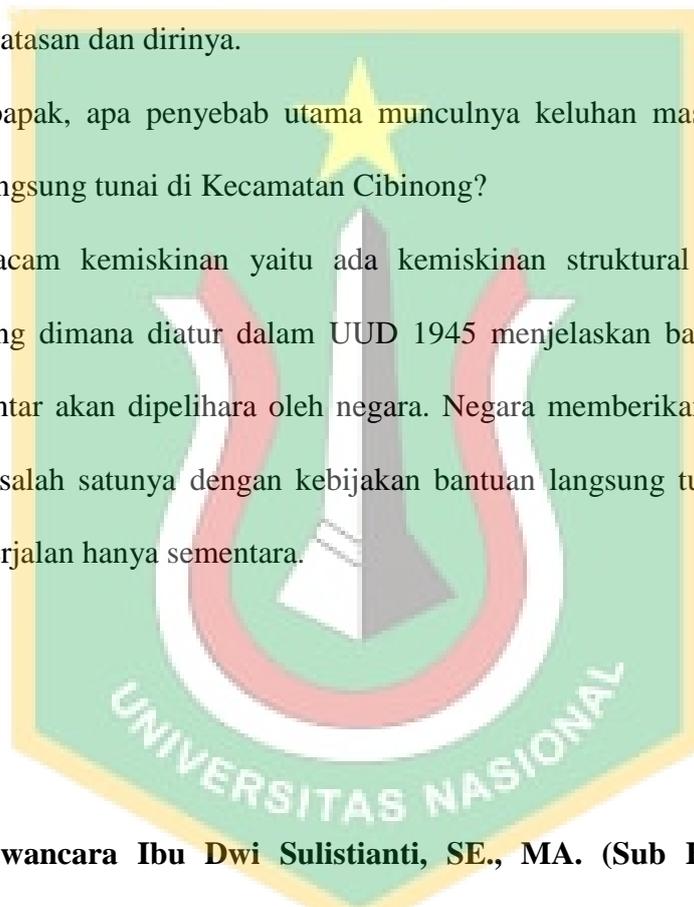
eksternal. DPRD lebih kepada wasmas (wawasan masyarakat). Contoh kalo ada pengaduan pasti larinya ke DPRD. DPRD juga memiliki konstituen (pendukung anggota DPRD).

6. Bagaimana jika seorang pegawai tidak menerapkan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan program kinerja DPRD?

Keliru, harus wajib menerapkan fungsi pengawasan. Kan ada pengawasan melekat dalam diri atasan dan dirinya.

7. Menurut bapak, apa penyebab utama munculnya keluhan masyarakat terhadap bantuan langsung tunai di Kecamatan Cibinong?

Macam-macam kemiskinan yaitu ada kemiskinan struktural dan kemiskinan sosial. Yang dimana diatur dalam UUD 1945 menjelaskan bahwa fakir miskin yang terlantar akan dipelihara oleh negara. Negara memberikan fasilitas kepada warganya salah satunya dengan kebijakan bantuan langsung tunai dan program tersebut berjalan hanya sementara.



Hasil Wawancara Ibu Dwi Sulistianti, SE., MA. (Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan DPRD Kabupaten Bogor)

1. Apa mekanisme yang diterapkan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Bogor?

Dalam melaksanakan tugasnya, DPRD Mempunyai fungsi:

- a. Pembentukan peraturan daerah
- b. Anggaran

c. Pengawasan

Ketiga fungsi diatas dijalankan dalam rangka representasi rakyat di Kabupaten Bogor. Mekanisme pengawasan DPRD terhadap Pemerintahan Daerah terwujud dalam bentuk pengawasan terhadap:

- Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati.
- Pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah dan
- Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pengawasan dapat dilaksanakan melalui:

- a. Rapat kerja komisi dengan pemerintah daerah
 - b. Kegiatan kunjungan kerja
 - c. Rapat dengar pendapat umum dan
 - d. Pengaduan masyarakat
2. Menurut ibu, apa makna dari adanya fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD Kabupaten Bogor?

Makna adanya fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD Kabupaten Bogor dengan adanya fungsi pengawasan DPRD dapat melakukan kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan dan kinerja pemerintah daerah sebagai fungsi check and balance diharapkan mampu mendorong pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.

3. Apa aturan atau dasar hukum dari fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Bogor?

- a. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - c. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor.
 - d. Peraturan DPRD Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan DPRD Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2018 tentang tata tertib.
 - e. Peraturan DPRD Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2020 tentang kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor.
4. Apa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Bogor?
- Kabupaten Bogor mempunyai luas wilayah 2.986,20k km² dengan 40 kecamatan, 16 kelurahan, dan 410 desa serta jumlah penduduk 5.427.068 jiwa. Berdasarkan hal tersebut banyak faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD diantaranya faktor sosial budaya, ekonomi, teknologi, dan pertahanan serta faktor kualitas sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat dalam mendukung fungsi pengawasan DPRD.
5. Bagaimana pengaruh fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Bogor terhadap penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Kecamatan Cibinong?

Fungsi ini sangat berpengaruh dalam pemantauan data penerima bantuan langsung tunai. Dengan adanya fungsi pengawasan dapat meminimalisir adanya data ganda penerima bantuan langsung tunai sehingga bantuan langsung tunai penerimanya sesuai sasaran atau tepat sasaran.

6. Bagaimana jika seorang pegawai tidak menerapkan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan program kinerja DPRD?

Jika fungsi pengawasan tidak dilakukan dengan baik maka tidak ada kontrol dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan program kerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Karena fungsi pengawasan merupakan penyeimbang dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.

7. Menurut ibu, apa penyebab utama munculnya keluhan masyarakat terhadap bantuan langsung tunai di Kecamatan Cibinong?

Penyebab utamanya adalah data yang dibuat tidak valid, menyebabkan kesalahan dalam pembagian dana BLT yang seharusnya diberikan kepada orang yang berhak menerimanya akibatnya sebagian warga miskin mengeluh kejadian dalam pembagian blt. Karena mereka yang seharusnya masuk kedalam daftar RTS (Rumah Tangga Sasaran) tidak mendapat bantuan. Pendataan warga perlu dilakukan setiap periodenya agar sewaktu BLT akan dilaksanakan petugas pendata mendapatkan data yang valid mengenai jumlah warga miskin yang berhak menerima BLT, karena perubahan ekonomi yang terjadi setiap saat dapat menyebabkan taraf hidup warga yang berubah-ubah pula.

Hasil Wawancara Bapak Dian Burhanuddin, S.E., M.Si. (Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Cibinong)

1. Menurut bapak, apakah pelaksana program ini sudah sesuai dengan prosedur?

Intinya sudah sesuai dengan prosedur.

2. Apakah program bantuan langsung tunai memberikan manfaat untuk masyarakat Kecamatan Cibinong?

Normatif dan sangat membantu bagi masyarakat yang membutuhkan.

3. Apakah terdapat hambatan dalam menjalankan program tersebut?

Yang menjadi hambatan adalah domisili. Banyak yang pindah tanpa melapor ke kelurahan atau kecamatan, akhirnya uang tidak sampai ke penerima bantuan. Jadinya uang tidak dapat disalurkan.

4. Menurut bapak, apakah masyarakat penerima bantuan langsung tunai sudah merasa terbantu dengan adanya program tersebut?

Sangat membantu. Membantu meringankan beban pengeluaran. Saran saya pemerintah perlu menyediakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang membutuhkan.

5. Apakah masyarakat penerima bantuan langsung tunai diberikan secara langsung oleh penyelenggara?

Disalurkan melalui pos giro atau pos indonesia yang sumber nya berasal dari kemensos.

6. Menurut bapak, penyampaian informasi seperti apa yang mudah diterima langsung oleh masyarakat penerima bantuan langsung tunai?

Melalui media elektronik agar mudah dan cepat informasi yang didapatkan.

7. Apakah ada kendala dalam menyampkai informasi tersebut?

Banyak masyarakat yang idak mengetahui teknologi dan informasi yang disampaikan oleh RT tidak cepat.

8. Apakah informasi yang diberikan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat penerima bantuan langsung tunai?

Sangat membantu apalagi yang memiliki gadget atau media sosial.

9. Apakah seorang pelaksana atau pemimpin sudah menjalankan tugasnya dengan baik?

Berusaha semaksimal mungkin dan cepat, tepat sasaran

10. Apakah seorang pemimpin mendukung adanya program bantuan langsung tunai?

Sangat mendukung, karena proses nya juga berkelanjutan.

11. Apakah dalam pelaksanaan proram tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan?

Sudah sesuai dengan prosedur.

Hasil Wawancara Masyarakat Kecamatan Cibinong (Ibu Neneng Ernawati)

1. Apakah ibu sudah mengetahui tentang program langsung tunai?

Sudah mengetahui, karena di lingkungan Kecamatan Cibinong ada program tersebut.

2. Menurut ibu, apakah dengan adanya program bantuan langsung tunai memberikan manfaat atau justru merugikan?

Ada ketergantungan yaitu kalau memang memberikan manfaat kalau mereka yang diberikan tepat sasaran contohnya sesuai dengan programnya misalnya orang yang tidak mampu itu manfaat nya sangat banyak. Kalau merasa merugikan saya belum tahu, sepertinya tidak. Tetapi kalau manfaat kalau tepat sasaran sangat bermanfaat

3. Menurut ibu apakah tujuan yang dilakukan sudah dirasakan?

Selama ini memang dirasakan kembali lagi bantuan yang diberikan kepada orang yang tepat sasaran sudah sangat dirasakan manfaat nya, yang penting tepat sasaran

4. Apakah ibu mengikuti program bantuan langsung tunai di Kecamatan Cibinong?

Engga, kebetulan saya RW saya hanya monitoring ke warga

5. Apakah ibu berperan aktif dalam program bantuan langsung tunai di Kecamatan Cibinong?

Kalau di Kecamatan engga, Cuma di Lingkungan RW aja.

6. Menurut ibu, apa alasan sehingga ibu berperan aktif dalam program bantuan langsung tunai?

Kita ikut berperan aktif di lingkungan karena kita hanya ingin tepat sasaran jadi sesuai yang dituju kepada pemerintah memang tujuannya untuk memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Jadi kita ikut serta membantu.

7. Apakah ada seorang pemimpin yang meminta imbalan?

Tidak kalau disini, kita tidak meminta imbalan.

8. Apakah seorang petugas dan pemimpin dari dinas sosial datang langsung untuk mengarahkan program bantuan langsung tunai kepada ibu?

Selama ini laporan nya dari RT/RW ke dinas lalu ke kelurahan dan ke dinas sosial. Nah dinas sosial sendiri yang akan terjun langsung ke tempatnya langsung, apakah dia layak atau tidak untuk menerima bantuan langsung tunai. Nanti orang dinas sosial nya datang untuk di cek lagi.

Hasil Wawancara Masyarakat Kecamatan Cibinong (Ibu Suharni)

1. Apakah ibu sudah mengetahui tentang program langsung tunai?

Sudah tahu

2. Menurut ibu, apakah dengan adanya program bantuan langsung tunai memberikan manfaat atau justru merugikan?

Menurut saya sangat bermanfaat, karena saya merasakannya.

3. Menurut ibu apakah tujuan yang dilakukan sudah dirasakan?

Tujuan dari bantuan itu dirasakan bagi orang yang benar-benar membutuhkan.

4. Apakah ibu mengikuti program bantuan langsung tunai di Kecamatan Cibinong?

Saya termasuk masyarakat penerima bantuan di Kecamatan Cibinong.

5. Apakah ibu berperan aktif dalam program bantuan langsung tunai di Kecamatan Cibinong?

Engga aktif

6. Menurut ibu, apa alasan sehingga ibu berperan aktif dalam program bantuan langsung tunai?

Kita kan sebagai penerima bantuan jadi untuk berperan aktif mungkin lembaga masyarakat yang lebih paham.

7. Apakah ada seorang pemimpin yang meminta imbalan?

Engga ada kalau disini

8. Apakah seorang petugas dan pemimpin dari dinas sosial datang langsung untuk mengarahkan program bantuan langsung tunai kepada ibu?

Biasanya dari dinas sosial datang ke kelurahan atau kecamatan untuk kasih data penerima bantuan, baru disalurkan melalui RT/RW.

LAMPIRAN 2



69° E
No.1 Jalan Bersih
Tengah
Kecamatan Cibinong
Kabupaten Bogor
Jawa Barat
Altitude:144.1m
TKSK Cibinong SOFA
Index number: 542
4 Jan 2023 12.53.54

Bapak Drs. Djodi Anggoronadi sebagai Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Bogor dan Bapak Sofa selaku TKSK Kabupaten Cibinong



Bapak Enday Zarkasyi, S.Sos., MA sebagai Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan DPRD Kabupaten Bogor dan Ibu Dwi Sulistianti, SE., MA sebagai Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan



Bapak Dian Burhanudin sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Kecamatan Cibinong



Ibu Neneng Ernawati sebagai Koordinator RW di Desa Pakansari Kecamatan
Cibinong sekaligus Masyarakat Kecamatan Cibinong



Ibu Suharni sebagai masyarakat penerima bantuan langsung tunai di Kecamatan Cibinong



Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. KSR Dadi Kusmayadi Komplek Pemda Kel. Tengah Cibinong – Bogor 16914
Email : kesbangpolbogor09@gmail.com, Web : bakesbangpol.bogorkab.go.id, Telp/Fax. (021) 8768836

Cibinong, 22 Desember 2022

Nomor : 070 / 763 - Bakesbangpol
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. 1. Sekretaris DPRD
2. Kepala Dinas Sosial
3. Camat Cibinong
Kabupaten Bogor
di
Cibinong

Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Bupati Bogor Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor.

Menimbang :
Surat Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional, Nomor : 990/WD/XII/2022, Tanggal 08 Desember 2022, Perihal Permohonan Penelitian dan Informasi Data.

Atas dasar tersebut diatas, kami memberikan **Rekomendasi Penelitian** kepada :
Nama : **MAULINA NUR KHASANAH**
Alamat : Kp. Babakan, RT.03/RW.02, Kel. Suktani, Kec. Tapos, Kota Depok
Judul Penelitian : Analisis Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 (Studi Kasus: Pembagian Bantuan Langsung Tunai di Kecamatan Cibinong)
Penanggung Jawab : **Dr. BHAKTI NUR AVIANTO, M.Si.**
Jumlah Peserta : 1 (Satu) Orang
Waktu : 23 Desember 2022 s.d 31 Januari 2023
Tempat : 1. Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor
2. Dinas Sosial Kabupaten Bogor
3. Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor

Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Mentaati seluruh Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;
2. Ikut menjaga situasi, stabilitas kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di lokasi Penelitian;
3. Senantiasa berkoordinasi dan mengikuti petunjuk dan arahan dari Pimpinan Lembaga / Instansi tempat pelaksanaan penelitian atau Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) setempat;
4. Tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan di luar ketentuan yang ditetapkan di atas;
5. Mengadakan koordinasi dengan stakeholder terkait;
6. Mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19;
7. Setelah selesai melaksanakan kegiatan, agar Mahasiswa yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Bupati Bogor melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

**A. N KEPALA BADAN
KABID KEWASPADAAN NASIONAL
DAN PENANGANAN KONFLIK,**

ASEP NURDIN, S.Sos., MA
PEMBINA
NIP. 196711101991021006

Universitas Nasional

Tembusan :
1. Yth. Pjt. Bupati Bogor (Sebagai Laporan);
2. Yth. Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional.



UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
TERAKREDITASI BAN-PT

Jl. Sawo Manis No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520
Telp. (021) 70737624, 7806700 Ext. 146, Fax. 7802718-7802719
Homepage : <http://www.unas.ac.id> Email : info@unas.ac.id

Nomor : 954/WD/MI/2022 Jakarta, 06 Desember 2022
Lamp : -
Perihal : Permohonan Penelitian dan Informasi Data

Kepada Yth :
Bagian Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Bogor
Di Tempat

Dengan hormat,

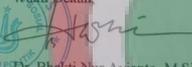
Bersama ini kami perkenalkan dengan hormat mahasiswa di bawah ini:

Nama : Maulina Nur Khasanah
Nomor Induk Mahasiswa : 193515516105
Prodi/Konsentrasi : Administrasi Publik
Alamat Rumah : Jalan H. Tinggi RT 03/RW 02 No. 77 Sukatani-
Tapos Depok
HP : 085319465582
Tanggal Penelitian : 16 Desember 2022- 16 Januari 2023

Mahasiswa tersebut bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul: *Analisis Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 (Studi Kasus: Pembagian Bantuan Langsung Tunai Di Kecamatan Cibinong)*. Dengan Dosen Pembimbing : Bapak Dr. Bhakti Nur Avianto, S.IP., M.Si.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan bantuan seperlunya.

Demikian atas perhatiannya dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wakil Dekan,

Dr. Bhakti Nur Avianto, M.Si

BAB 1 BAB 5 Maulina

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Defense University Student Paper	2%
2	docplayer.info Internet Source	1%
3	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
4	Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part II Student Paper	1%
5	repository.upstegal.ac.id Internet Source	1%
6	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
7	jurnal.syntaxliterate.co.id Internet Source	1%
8	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
9	id.123dok.com Internet Source	1%
10	pjscenter.org Internet Source	<1%
11	text-id.123dok.com Internet Source	<1%
12	Submitted to Alvin Community College Student Paper	<1%
13	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	<1%
14	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	<1%
15	repository.fisip-untirta.ac.id Internet Source	<1%
16	eprints.untirta.ac.id Internet Source	<1%
17	repositori.iain-bone.ac.id Internet Source	<1%
18	123dok.com Internet Source	<1%

19	Submitted to University of North Georgia Student Paper	<1 %
20	ppid.bogorkab.go.id Internet Source	<1 %
21	k3.disnakertrans.jatimprov.go.id Internet Source	<1 %

22	library.binus.ac.id Internet Source	<1 %
23	id.scribd.com Internet Source	<1 %
24	repository.unas.ac.id Internet Source	<1 %
25	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	<1 %
26	Submitted to Universitas Pendidikan Ganesha Student Paper	<1 %
27	repository.unissula.ac.id Internet Source	<1 %
28	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
29	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
30	dspace.uil.ac.id Internet Source	<1 %
31	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	<1 %
32	Submitted to IAIN Pontianak Student Paper	<1 %
33	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	<1 %

34	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
35	repository.uir.ac.id Internet Source	<1 %
36	jurnal.unigal.ac.id Internet Source	<1 %
37	Submitted to Universitas Lancang Kuning Student Paper	<1 %
38	Submitted to Universitas Muhammadiyah Magelang Student Paper	<1 %

39	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	<1 %
40	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	<1 %
41	ejournal3.undip.ac.id Internet Source	<1 %
42	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %
43	Submitted to Institut Agama Islam Negeri Curup Student Paper	<1 %

44	Submitted to Universitas Islam Negeri Raden Fatah Student Paper	<1 %
45	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1 %
46	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
47	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
48	www.scribd.com Internet Source	<1 %
49	Submitted to Lambung Mangkurat University Student Paper	<1 %
50	Submitted to University of North Texas Student Paper	<1 %
51	Siti Nur Afni, Jamiah Jamiah, Raudah Mahmud. "Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser". PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan, 2021 Publication	<1 %
52	docobook.com Internet Source	<1 %
53	Submitted to IAIN Kudus Student Paper	<1 %

54	Submitted to UIN Walisongo Student Paper	<1 %
55	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	<1 %

56	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1 %
57	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	<1 %
58	Submitted to Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai Student Paper	<1 %
59	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	<1 %
60	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	<1 %
61	ejurnal.mercubuana-yogya.ac.id Internet Source	<1 %
62	jmm.ikestmp.ac.id Internet Source	<1 %
63	journal.unismuh.ac.id Internet Source	<1 %
64	repository.umpalopo.ac.id Internet Source	<1 %
65	repository.unair.ac.id Internet Source	<1 %
66	widyasari-press.com Internet Source	<1 %
67	medialokal.co Internet Source	<1 %
68	nanopdf.com Internet Source	<1 %
69	www.ayobandung.com Internet Source	<1 %
70	adoc.pub Internet Source	<1 %
71	firdafaizatulqomariyah.wordpress.com Internet Source	<1 %
72	jurnal.untad.ac.id Internet Source	<1 %
73	karyabangping.blogspot.com Internet Source	<1 %
74	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
75	repository.radenfatah.ac.id Internet Source	<1 %
76	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1 %

77	studylibid.com Internet Source	<1 %
78	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
79	dinsos.bogorkab.go.id Internet Source	<1 %
80	es.scribd.com Internet Source	<1 %
81	guruveda.wordpress.com Internet Source	<1 %
82	journal.lppm-unasman.ac.id Internet Source	<1 %
83	journal.umpalangkaraya.ac.id Internet Source	<1 %
84	jurnalbhumi.stpn.ac.id Internet Source	<1 %
85	libraryproceeding.telkomuniversity.ac.id Internet Source	<1 %
86	media.neliti.com Internet Source	<1 %
87	repository.iainpare.ac.id Internet Source	<1 %
88	repository.ibs.ac.id Internet Source	<1 %
89	repository.uhn.ac.id Internet Source	<1 %
90	riset.unisma.ac.id Internet Source	<1 %
91	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
92	www.mlindonesia.org Internet Source	<1 %
93	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
94	e-perpus.unud.ac.id Internet Source	<1 %
95	eprints.undip.ac.id Internet Source	<1 %